



OPINI PUBLIK DALAM ISU SOSIAL DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Habib Ardi¹, Putri Maharani², Caya Aulia Br Ginting³, Icha Listya Sitepu⁴

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Habibardi4@gmail.com¹, putrimaharaani47@gmail.com², cayaaulia987@gmail.com³,
ichai7903@gmail.com⁴

Abstract (English)

Social issues and public policies are always in the public conversation, and can shape opinions in society. This study examines four main aspects: public opinion on health, education, and environmental issues, as well as the role of opinion surveys in public policy, government responses to public opinion, and case studies of public opinion on social issues and policies. This study uses a qualitative approach to understand how people form opinions on an issue or policy, as well as the impact of public opinion on government policy. The results of the study are expected to provide insights to improve public response to social issues and public policies.

Article History

Submitted: 04 January 2025

Accepted: 13 January 2025

Published: 14 January 2025

Key Words

Social issues, opinion, public, policy

Abstrak (Indonesia)

Isu sosial dan kebijakan publik selalu menjadi perbincangan publik, serta dapat membentuk opini – opini dilingkungan masyarakat. Penelitian ini mengkaji empat aspek utama: opini publik dalam isu kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, juga peran survei opini dalam kebijakan publik, respon pemerintah terhadap opini publik, dan studi kasus opini publik dalam isu sosial maupun kebijakan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami bagaimana masyarakat membuat opini terhadap suatu isu atau kebijakan, serta dampak opini publik terhadap kebijakan pemerintah. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan untuk meningkatkan respon publik terhadap isu sosial dan kebijakan publik.

Sejarah Artikel

Submitted: 04 January 2025

Accepted: 13 January 2025

Published: 14 January 2025

Kata Kunci

Isu sosial, opini, publik, kebijakan

A. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem pemerintahan yang responsif terhadap opini publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Hennesey (1970: 33), "... *responsiveness to public opinion is an essential ingredient of democratic goverment*". Dalam konteks ini, opini publik dipahami selalu berkenaan dengan isu- isu substantif kebijakan publik, dengan asumsi bahwa opini publik seharusnya menentukan pilihan-pilihan kebijakan (Broughton, 1995: 23)(Chatamallah, 2007).

Opini publik memegang peran krusial dalam sistem demokrasi, termasuk di Indonesia, karena pemerintahan yang mengabaikan pandangan masyarakat cenderung tidak mencapai keberhasilan. Dalam pemerintahan yang demokratis, tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat (Petthe, 2018). Kebijakan atau keputusan yang sesuai dengan opini publik biasanya lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Selain itu, opini publik sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah maupun keluhan masyarakat dalam kinerja produk yang dibeli maupun pelayanan yang



diterima saat ini. Opini publik memainkan peran yang sangat penting dalam dinamika sosial dan politik, khususnya dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Opini publik dapat diartikan sebagai pandangan, sikap, atau persepsi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai isu-isu tertentu yang sedang berkembang, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Isu sosial seperti ketidaksetaraan ekonomi, hak asasi manusia, perubahan iklim, atau pendidikan sering kali menjadi topik utama yang membentuk opini publik. Ketika pemerintah membuat kebijakan, opini publik dapat mempengaruhi atau bahkan menekan keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan.(Rianto, 2010)

Secara keseluruhan, interaksi antara opini publik dan kebijakan pemerintah merupakan proses yang saling memengaruhi. Opini publik tidak hanya berfungsi sebagai indikator arah kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat, tetapi juga sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana opini publik terbentuk, bagaimana ia memengaruhi kebijakan, serta bagaimana kebijakan pemerintah merespons opini publik sangatlah penting dalam menganalisis isu-isu sosial dan kebijakan publik di suatu negara.

Maka, penting bagi penelitian ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek – aspek opini publik, yaitu opini publik dalam isu kesehatan, pendidikan dan lingkungan, juga respon pada pengambilan keputusan, peran survei opini dalam kebijakan publik, respon pemerintah terhadap opini publik, serta studi kasus kebijakan publik di Indonesia. Dengan kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana opini publik dalam isu sosial dan kebijakan publik.(Rusi et al., 2020)

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali secara mendalam mengenai opini publik dalam isu sosial dan kebijakan publik. Salah satu penelitian yang digunakan adalah analisis studi kasus di mana masyarakat menanggapi isu sosial atau kebijakan pemerintah, seperti korupsi penanganan sosial ekonomi (Nian Riawati, 2008). Melalui studi kasus, penelitian dapat menganalisis tentang opini publik terhadap isu sosial dan kebijakan publik.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang tanggapan atau opini masyarakat terhadap isu sosial dan kebijakan berupa kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, beberapa penelitian memberikan tentang situasi yang kompleks dan memberikan gambaran pada penelitian.

Selain itu, menggunakan survei opini dalam kebijakan publik untuk menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat pada kebijakan pemerintah. Serta mengidentifikasi peran masyarakat dalam menggiring opini terhadap isu sosial maupun kebijakan, yang dapat memberikan bentuk hasil kepada pemerintah.

Penelitian terhadap opini publik dalam isu sosial dan kebijakan publik sangat penting untuk memahami dinamika hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Dengan memahami bagaimana opini publik terbentuk, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta bagaimana ia dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kita dapat memperbaiki proses pembuatan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN



1. OPINI PUBLIK

Opini publik, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *public opinion*, merujuk pada pendapat individu atau kelompok masyarakat yang muncul melalui diskusi terkait suatu isu yang melibatkan berbagai pihak berkepentingan. Opini publik dapat dipahami dari dua perspektif. Pertama, sebagai survei yang bersifat personal, individual, representatif, dan dapat diukur. Kedua, melalui media sosial yang bersifat publik, relasional, hierarkis, dan juga terukur (McGregor, 2019). Meskipun opini publik tidak memiliki tingkatan tertentu, opini ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: 1) Opini positif, yaitu respons yang menyenangkan terhadap suatu isu atau individu; 2) Opini netral, ketika pendapat diberikan tanpa membawa dampak perubahan; dan 3) Opini negatif, berupa tanggapan buruk atau kurang menyenangkan terhadap suatu isu atau individu (Effendy, 2003) (Dedy Sugiarto et al., 2022).

Opini publik menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemangku kepentingan atau kebijakan tertentu. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Surian et al. (2016) mengenai distribusi vaksin human papillomavirus (HPV), ditemukan bahwa opini publik tidak selalu sejalan dengan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun vaksin HPV secara ilmiah telah terbukti aman, perbincangan di media sosial menyebarkan informasi yang meragukan tingkat efektivitasnya di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat. Opini tersebut dipengaruhi oleh pemberitaan di portal media dan diperkuat oleh pernyataan beberapa tokoh publik, yang pada akhirnya memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap isu tersebut (Asghari, 2018) (Septa & Kusumasari, 2023).

Opini publik terhadap citra lembaga pendidikan merujuk pada tanggapan, persepsi, atau pandangan masyarakat mengenai kualitas yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Secara umum, citra atau *image* adalah kesan, perasaan, atau gambaran yang dimiliki publik tentang suatu institusi. Persepsi masyarakat terhadap citra lembaga pendidikan terbentuk ketika lembaga tersebut mampu menunjukkan manajemen pendidikan yang berkualitas (Ibrahim et al., 2022).

Sebagai perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sensitif dan sangat dipengaruhi oleh opini publik, Pertamina Internasional EP menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola pandangan masyarakat terkait aktivitas operasionalnya serta dampaknya terhadap komunitas dan lingkungan. Sebagai perusahaan energi yang berfokus pada eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di tingkat internasional, Pertamina Internasional EP merupakan bagian dari grup Pertamina yang menjalankan operasinya di berbagai negara untuk memperoleh dan mengelola sumber daya energi yang berharga. Perusahaan ini juga menunjukkan komitmen yang kuat terhadap standar keselamatan, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitasnya (Taryana, 2023).

Opini publik adalah wujud dari sikap dan pandangan masyarakat yang dapat mengalami perubahan baik dalam hal intensitas maupun stabilitas. Opini publik merefleksikan perasaan kolektif suatu populasi terhadap suatu isu tertentu (Morissan, 2018). Mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap tindakan pemerintah merupakan langkah yang penting, karena pandangan publik dapat menjadi sumber masukan yang bernilai dalam proses pengembangan kebijakan (Canel & Sanders, 2012). Oleh karena itu, opini publik berfungsi sebagai alat untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pemerintahan serta kebijakan yang diterapkan (Khusna, 2016) (Purwandini, 2017).



2. PERAN SURVEI OPINI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Di negara dengan demokrasi yang sedang berkembang, survei menjadi alat penting untuk memahami persepsi dan harapan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mengevaluasi kebijakan yang diterapkan. Tradisi survei opini publik merupakan hal yang relatif baru dalam penelitian ilmu sosial di Indonesia. Survei mulai dikenal pada akhir 1990-an ketika LP3ES melaksanakan survei di Pulau Jawa dan memperkenalkan metode hitung cepat (quick count) pada Pemilu 1997 di Jakarta (Mietzner, 2009; Ufen, 2010).

Sejak 2004, survei menjadi metode yang efisien untuk mengukur pandangan pemilih terhadap kandidat atau partai politik. Pemilihan presiden secara langsung pada 2004 dan pemilihan kepala daerah pada 2005 memperkuat kebutuhan akan penelitian perilaku pemilih. Kemajuan lembaga survei setelah 2004 didorong oleh kontribusi akademisi yang baru menyelesaikan studi di luar negeri. Salah satu contohnya adalah Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang didirikan oleh Saiful Mujani dan Denny Januar Ali pada awal 2000-an. LSI dikenal memiliki keahlian metodologi dan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan survei secara ilmiah (Fernandes, 2020).

3. RESPON PEMERINTAH TERHADAP OPINI PUBLIK

Opini publik memegang peranan penting dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Pemerintahan tidak dapat mencapai keberhasilan jika mengabaikan pandangan masyarakat, karena tujuan utama dari sistem demokratis adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat (Pethe, 2018). Kebijakan atau keputusan yang sejalan dengan opini publik cenderung lebih mudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konteks opini publik, perhatian tidak hanya tertuju pada mayoritas secara angka (numerical majority), tetapi juga pada mayoritas yang memiliki pengaruh nyata (effective majority) (Kisworo & Shauki, 2019).

Sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem pemerintahan yang responsif terhadap opini publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Hennessey (1970: 33), "... responsiveness to public opinion is an essential ingredient of democratic government". Dalam konteks ini, opini publik dipahami selalu berkenaan dengan isu-isu substantif kebijakan publik, dengan asumsi bahwa opini publik seharusnya menentukan pilihan-pilihan kebijakan (Broughton, 1995: 23). (Rianto, 2010).

Opini publik barangkali memang mengidap kelemahan semacam itu. Namun, pada kenyataannya, pemerintahan tidak selalu bertindak atas nama rakyat sehingga harus dikontrol melalui opini publik. Di sisi lain, tidak selamanya opini publik mengandung kesalahan sebagaimana disinyalir Lipmann. Ada banyak bukti yang menunjukkan opini publik mengandung kebenaran. Ini akan sangat dipengaruhi oleh, salah satunya, bagaimana media massa memberikan suplai informasi kepada publik. Semakin baik informasi yang diberikan kepada warga negara, semakin baik pula kualitas opini publik.

Kebijakan yang sering mendapat kritik dari publik, seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menjadi salah satu contoh nyata dalam konteks ini. Kebijakan ini tidak terhindarkan bagi siapa pun yang memegang kekuasaan di Indonesia. Sejak era Soeharto hingga Yudhoyono, penyesuaian harga BBM dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi. Namun, kebijakan



tersebut, yang dianggap tidak "populer," sering kali menuai tanggapan negatif dari masyarakat, termasuk dari tokoh-tokoh ekonomi dan politik.

Menurut Hennesy, opini publik memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, dalam kasus kenaikan harga BBM, pemerintah tetap mencabut subsidi meskipun mendapatkan penolakan luas dari masyarakat. Ketidakpuasan yang muncul, termasuk dari kelompok kepentingan dan mahasiswa sebagai kelompok penekan, tidak selalu mampu mengubah keputusan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun opini publik penting, pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan tidak selalu signifikan (Riawati, 2016).

4. STUDI KASUS OPINI PUBLIK DALAM ISU SOSIAL DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Puncak kejadian terjadi pada malam 6 Oktober 2012, saat polisi tiba di kantor KPK dan menangkap Kompol Novel Baswedan dengan alasan pernah melakukan tindak pidana di Bengkulu pada tahun 2004 dan perlu ditahan. Insiden itu dengan cepat menarik perhatian. Ketertarikan masyarakat terhadap, terutama tekanan terhadap, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK sangatlah tinggi. Dukungan kemudian menyebar dengan cepat, dan secara spontan terbentuklah gerakan solidaritas yang bertujuan untuk menduduki kantor KPK dan mendukung KPK.

Dukungan tersebut tidak hanya disampaikan melalui media nasional, media sosial khususnya Twitter juga turut memberitakan kejadian di Gedung KPK. Opini masyarakat terhadap "upaya kriminalisasi KPK" juga dapat dengan cepat terbentuk melalui media sosial dengan menggunakan tagar "#saveKPK" dan "#saveindonesia".

Proses yang terjadi dengan cepat membentuk opini publik yang sebagian besar mendukung KPK dibandingkan kepolisian. Polisi dipersepsikan sebagai pihak yang bersalah, sementara KPK dianggap sebagai pihak yang benar. Namun, permasalahan muncul karena opini yang berkembang di ruang virtual sering kali menyudutkan pihak-pihak tertentu dengan menggunakan kata-kata kasar, penghinaan, pencemaran nama baik, dan tindakan serupa. Jika dikaitkan, tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Riawati, 2016).

D. PENUTUP

Simpulan

Jurnal ini mengkaji opini publik dalam isu sosial dan kebijakan publik, menyoroti beberapa aspek penting. Seperti, opini publik dalam isu kesehatan, pendidikan dan lingkungan, peran survei opini dalam kebijakan publik, respon pemerintah terhadap opini publik, serta studi kasus opini publik dalam menanggapi isu sosial dan kebijakan publik.

Respon masyarakat dalam suatu informasi sosial atau kebijakan dapat menimbulkan isu atau masalah terhadap kepercayaan publik. Peran pemerintah dapat menyikapi suatu opini publik yang telah muncul dalam lingkungan masyarakat, guna membangun citra atau kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang opini publik dalam menyikapi informasi berupa isu sosial dan kebijakan dapat memberikan dampak dan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan diperlukan untuk membentuk opini yang baik terhadap masyarakat.



Saran

Membentuk opini publik yang positif terhadap isu sosial maupun kebijakan publik melalui isu – isu yang positif dan kebijakan yang menguntungkan masyarakat, serta respon pemerintah pada opini publik. Memberikan ruang untuk masyarakat dalam menanggapi atau mengomentari tentang kebijakan pemerintah, sehingga menimbulkan opini yang positif dan netral.

Selain itu, penyebaran informasi yang positif pada masyarakat bisa mendapatkan opini yang baik dalam menanggapi berita – berita isu sosial dan kebijakan publik. Opini publik merupakan hal penting dalam sistem pemerintahan untuk menjaga kesan dan pesan yang di sebar luaskan.



E. DAFTAR PUSTAKA

- Chatamallah, M. (2007). Opini Publik dan Kebijakan Pemerintah. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 8(2), 249–256. <https://doi.org/10.29313/mediator.v8i2.1253>
- Dedy Sugiarto, Ema Utami, & Ainul Yaqin. (2022). Perbandingan Kinerja Model TF-IDF dan BOW untuk Klasifikasi Opini Publik Tentang Kebijakan BLT Minyak Goreng. *Jurnal Teknik Industri*, 12(3), 272–277. <https://doi.org/10.25105/jti.v12i3.15669>
- Fernandes, A. (2020). *Tantangan dan Pengalaman Survei Opini Publik di Indonesia*.
- Ibrahim, Anitah, & Niswah, C. (2022). Jurnal Pemasaran Jambura. *Jambura Journal of Educational Management*, 3(2), 85–93.
- Kisworo, J., & Shauki, E. R. (2019). Teori Institusional Dalam Penyusunan Dan Publikasi Laporan Tahunan Sektor Publik (Studi Kasus Pada Kementerian Dan Lembaga Negara Di Indonesia). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(4), 305–321. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i4.157>
- Purwandini, F. S. (2017). Analisis Isi Opini Publik tentang Kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 6(1), 65. <https://doi.org/10.31504/komunika.v6i1.1035>
- Rianto, P. (2010). Opini Publik, Agenda Setting, Dan Kebijakan Publik. In *Jurnal Komunikasi* (Vol. 5, Issue 1, pp. 31–40). <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol5.iss1.art4>
- Riawati, N. (2016). Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(2), 154. <https://doi.org/10.22146/jsp.10851>
- Rusi, M., Ujiantuti, E., & Nahar, L. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Membentuk Opini Publik Terkait Pemberlakuan PSBB [Strategy of the Government of Indonesia in Forming Public Opinion Regarding the Implementation of PSBB]. *Syntax Transformation*, 1(9), 632–640. <http://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/129>
- Septa, R. R., & Kusumasari, B. (2023). Opini Publik Terkait Tren Isu Kesehatan: Analisis Konten pada Twitter dan Portal Berita di Yogyakarta. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 34–43. <https://doi.org/10.47753/pjap.v2i2.34>
- Taryana, A. (2023). Peran Humas, Media Digital, dan Manajemen Opini Publik di Pertamina Internasional EP. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 3(2), 403–414. <https://doi.org/10.54082/jupin.173>